

PENGARUH KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, KESENJANGAN EKONOMI, DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Ira Megawati Gunawan Putri¹

1. Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Medan
e-mail: ira.mega30@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kualitas pembangunan manusia, kesenjangan ekonomi, dan tingkat kemiskinan terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan Umat Beragama diukur dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dipublikasikan Kementerian Agama Republik Indonesia, sedangkan Kualitas Pembangunan Masyarakat, Kesenjangan Ekonomi, dan Tingkat Kemiskinan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini, dan Persentase Penduduk Miskin yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan melalui model regresi data panel dengan fixed effect method terhadap sampel 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2021 hingga tahun 2023. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa daerah dengan IPM yang lebih baik cenderung memiliki tingkat kerukunan umat beragama yang juga lebih baik. Sementara itu, kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kerukunan Umat Beragama.

Kata kunci: kualitas pembangunan masyarakat, kesenjangan ekonomi, tingkat kemiskinan, kerukunan umat beragama

ABSTRACT

This research aims to provide empirical evidence regarding the effect of the quality of human development, the Economic Inequality, and the Poverty Levels on the Religious Harmony levels in Indonesia. Religious Harmony is measured by the Religious Harmony Index (KUB) which is published by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, while the Quality of Community Development, Economic Inequality, and Poverty Levels are measured by the Human Development Index (HDI), Gini Ratio, and Percentage of Poor Population published by the BPS Indonesia. The hypotheses are examined using panel data regression with fixed effect method to a sample of 34 provinces in Indonesia during 2021 to 2023. The result of this research concludes that provinces with better HDI tend to have better levels of religious harmony. Meanwhile, economic inequality and poverty levels have no significant effect on the Religious Harmony.

Keywords: quality of human development, economic inequality, poverty levels, religious harmony

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang penduduknya memiliki beragam budaya, agama, dan suku bangsa yang menunjukkan struktur sosial bangsa Indonesia yang majemuk. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, Badan Pusat Statistik (2012) dalam laporannya menyatakan bahwa jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia secara keseluruhan mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa. Agama yang dianut oleh penduduk juga beragam, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu. Kemajemukan bangsa Indonesia tersebut turut digambarkan

dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang bermakna “beraneka ragam (suku bangsa, agama, bahasa) namun tetap satu (Indonesia), yang sekaligus menggambarkan falsafah hidup bangsa Indonesia untuk menghargai keberagaman dan membangun toleransi antar masyarakat yang beragam suku bangsa dan agama.

Di bidang keagamaan, Pemerintah telah berkomitmen untuk menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya itu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Undang-undang tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan beragama yang beragam di Indonesia. Namun demikian, konflik keagamaan masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan rilis data Setara Institute (2024), terdapat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia pada tahun 2023. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022, yaitu 175 peristiwa dengan 333 tindakan. Kondisi tersebut berpotensi mengancam terciptanya kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama, antara lain faktor ekonomi dan faktor pengetahuan atau pendidikan. Kesenjangan ekonomi dapat berpotensi menciptakan ketegangan dan/atau konflik dalam tatanan masyarakat yang penuh dengan keberagaman (Asokan, 2011). Di samping itu, pendidikan juga menjadi faktor penting dalam membentuk kerukunan atau keharmonisan antar umat beragama melalui peningkatan kesadaran terhadap keberagaman (Dash, 2011), peningkatan potensi kesejahteraan ekonomi (Asokan, 2011), serta peningkatan pemahaman mendalam tentang keberagaman agama (Agustia *et al.*, 2023). Selanjutnya, penelitian ini akan menguji apakah faktor pendidikan dan faktor ekonomi tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia

1. Kerukunan Umat Beragama

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/8 Tahun 2006, Kerukunan Umat Beragama adalah suatu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai; kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan; kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tingkat kerukunan umat beragama tersebut selanjutnya diukur dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini terkait kerukunan umat beragama. Indeks KUB dinilai dalam rentang nilai 0 s.d. 100 dengan kategorisasi Sangat Rendah (0 s.d. 20,00), Rendah (20,01 s.d. 40,00), Sedang (40,01 s.d. 60,00), Tinggi (60,01 s.d. 80,00), dan Sangat Tinggi (80,01 s.d. 100).

Sesuai dengan Indeks Kerukunan Beragama 2023 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024), penilaian Indeks KUB meliputi penilaian terhadap 3 (tiga) dimensi utama, yaitu Toleransi antar Umat Beragama, Kesetaraan antar Umat Beragama, dan Kerja Sama

antar Umat Beragama. Penilaian Dimensi Toleransi mencakup 5 (lima) faktor, yaitu hidup bertetangga dengan penganut agama lain, pembangunan tempat ibadah di desa tempat tinggal, perayaan keagamaan di desa tempat tinggal, pertemanan anak-anak, dan peribadatan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Penilaian Dimensi Kesetaraan mencakup 7 (tujuh) faktor, yaitu hak menyiarkan ajaran agama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak untuk menjadi kepala daerah; hak untuk menjadi Presiden, kesamaan kedudukan di muka hukum, hak untuk mendapatkan layanan publik yang sama, hak untuk mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianut, serta hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Penilaian Dimensi Kerja Sama mencakup 6 (enam) faktor, yaitu kunjungan ke rumah antar penganut agama, partisipasi dalam kegiatan lingkungan, pengelolaan usaha bersama, transaksi jual beli antar penganut agama, partisipasi dalam komunitas atau organisasi, dan bantuan kepada penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah.

2. Pengaruh Faktor Perekonomian dan Faktor Pendidikan

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk Kerukunan Antar Umat Beragama. Kesenjangan ekonomi akibat kesempatan yang tidak merata akan berdampak pada terbaginya masyarakat pada 2 kelompok, yaitu kelompok kaya dan kelompok miskin, sehingga dapat berpotensi menciptakan ketegangan dan/atau konflik dalam tatanan masyarakat yang penuh dengan keberagaman (Asokan, 2011).

Sebaliknya, toleransi terhadap keberagaman, sebagai salah satu aspek dalam pembentuk Kerukunan, juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana diamati pada beberapa negara maju, seperti Swedia, Jerman, Finlandia dan Singapura, dimana toleransi sosial dan keberagaman berada di level yang tinggi di negara-negara tersebut mendorong perekonomian yang tumbuh dan stabil. Keanekaragaman budaya memperluas peluang ekonomi yang terbuka bagi semua sehingga toleransi terhadap keberagaman tersebut dapat menjadi fondasi dalam pembangunan, tidak hanya di bidang ekonomi namun juga di bidang sosial, seperti kehidupan intelektual, emosional, moral dan spiritual (Sofiandi *et al.*, 2022).

Di samping faktor ekonomi, pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk kerukunan sosial. Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran terhadap bagaimana pentingnya keharmonisan sosial di tengah keberagaman dalam masyarakat (Dash, 2011). Pendidikan juga dapat meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya sehingga memperkecil potensi konflik dalam kerukunan sosial yang didorong oleh kesenjangan ekonomi (Asokan, 2011). Pendidikan yang melibatkan aspek keberagaman dan pemahaman yang mendalam tentang keberagaman agama yang ada di masyarakat juga dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan penghargaan terhadap perbedaan sehingga dapat meningkatkan kerukunan antar umat beragama (Agustia *et al.*, 2023). Pendidikan dan dialog antar agama turut berperan penting dalam menumbuhkan saling pengertian dan rasa hormat di antara pemeluk agama yang beragam di Indonesia (Hutabarat, 2023).

3. Kualitas Pembangunan Manusia

Faktor ekonomi dan faktor pendidikan tersebut merupakan dimensi yang membentuk kualitas pembangunan manusia. *United Nations Development Programme* (UNDP) menggunakan 3 (tiga) dimensi utama untuk menilai kualitas pembangunan manusia, yaitu Kesehatan, Pengetahuan (Pendidikan), dan Standar Hidup (Ekonomi), yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator yang dikembangkan oleh UNDP guna mengukur pencapaian rata-rata menggunakan indeks yang dinormalisasi untuk masing-masing 3 (tiga) dimensi utama pembangunan manusia tersebut. Dimensi Kesehatan diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. Dimensi Pendidikan diukur dengan rata-rata lama bersekolah bagi orang dewasa berusia 25 tahun ke atas, dan harapan lama bersekolah bagi anak memasuki usia sekolah. Sementara itu, Dimensi Standar Hidup diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita.

Di Indonesia, pengukuran IPM dilakukan secara mandiri dengan mengadopsi metode yang sama yang dikembangkan UNDP terhadap 3 (tiga) dimensi yang sama, namun menggunakan indikator yang sedikit berbeda (Badan Pusat Statistik, 2024). Dimensi Kesehatan diukur dengan Umur Harapan Hidup saat Lahir yang merupakan perkiraan rata-rata lamanya waktu (dalam tahun) yang akan dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Dimensi Pengetahuan atau Pendidikan diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah, yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan formal. Sementara itu, Dimensi Standar Hidup diukur dengan Pengeluaran Riil per Kapita. Badan Pusat Statistik (BPS) membagi capaian pembangunan manusia ke dalam 4 kelompok berdasarkan nilai IPM, yaitu Kelompok Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$), Kelompok Tinggi ($70 \leq IPM < 80$), Kelompok Sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan Kelompok Rendah ($IPM < 60$).

Dalam pengukurannya, IPM hanya menyederhanakan dan mencakup sebagian dari aspek-aspek dalam pembangunan manusia sehingga tidak mencerminkan kesenjangan, kemiskinan, keamanan manusia, pemberdayaan, dan lain-lain (UNDP, 2024). Oleh karena itu selain IPM, faktor perekonomian lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Tingkat kesenjangan ekonomi dinilai dengan Rasio Gini yang mengukur sejauh mana pemerataan distribusi pendapatan antar individu atau rumah tangga dalam suatu perekonomian. Rasio Gini memiliki rentang 0 s.d. 100 dimana 0 berarti pemerataan ekonomi yang sempurna dan 100 berarti kesenjangan ekonomi yang sempurna. Sementara itu, tingkat kemiskinan masyarakat diukur dengan persentase jumlah penduduk yang dikelompokkan sebagai penduduk miskin terhadap jumlah seluruh penduduk.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu apakah kualitas pembangunan masyarakat, kesenjangan ekonomi, dan tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia. Data penelitian mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2021 s.d. 2023 dengan total jumlah observasi

sebanyak 102 observasi. Persamaan regresi berganda terhadap data panel penelitian dijelaskan dalam Persamaan 2.1 berikut.

$$KUB_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 GINI_{it} + \beta_3 POVRT_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2.1)$$

Keterangan:

KUB_{it}	= Kerukunan Umat Beragama yang diukur dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) provinsi
β₀	= Konstanta atau <i>intercept</i>
IPM_{it}	= Kualitas pembangunan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
GINI_{it}	= Tingkat kesenjangan ekonomi yang diukur dengan rasio Gini provinsi.
POVRT_{it}	= Tingkat kemiskinan yang diukur dengan persentase jumlah penduduk yang dikelompokkan sebagai penduduk miskin terhadap jumlah seluruh penduduk provinsi
β₁, β₂, β₃	= Koefisien variabel independen
ε_{it}	= Koefisien error

Pengujian empiris dalam penelitian ini terdiri atas statistik deskriptif variabel penelitian; pemilihan model regresi data panel; pengujian asumsi klasik; serta pengujian hipotesis. Dalam menentukan alternatif model regresi data panel yang digunakan (*pooled least square*, *fixed effect*, atau *random effect*), dilakukan uji Chow dan uji Hausman.

Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas melalui histogram dan grafik Normal P-P Plot, uji multikolinearitas melalui uji korelasi antar variabel independen, serta uji heteroskedastisitas melalui *spearman-rank correlation* antara residual dengan variabel independen. Pengujian hipotesis meliputi analisis hasil uji *F-Statistic* guna mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen, uji *goodness-of-fit* guna mengetahui seberapa jauh variabel independen secara keseluruhan dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen melalui model regresi, serta uji *t-statistic* guna mengetahui variabel independen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik deskriptif

Hasil statistik deskriptif secara keseluruhan pada Tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing variabel, baik variabel dependen maupun variabel independen, yang dihitung berdasarkan data sampel secara keseluruhan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 2021-2023

Variabel	Mean	Median	Minimum	Maximum	Std. Dev.
KUB	74,39	75,04	57,51	85,78	5,12
IPM	71,98	72,17	60,62	82,46	3,89
GINI	0,34	0,34	0,25	0,46	0,04

POVRT	10,37	8,67	4,25	26,86	5,23
-------	-------	------	------	-------	------

Jumlah Sampel = 102. KUB = Kerukunan Umat Beragama yang diukur dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama, IPM = Kualitas pembangunan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia, GINI = Tingkat kesenjangan ekonomi yang diukur dengan rasio Gini, POVRT = Tingkat kemiskinan yang diukur dengan persentase penduduk yang dikelompokkan sebagai penduduk miskin terhadap seluruh penduduk.

Sumber: diolah dari data primer, 2024

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata Indeks KUB dari 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2021 s.d. 2023 adalah 74,39, yang berada pada rentang nilai KUB kategori Tinggi (60 s.d. 80) yang mencerminkan tingkat kerukunan umat beragama yang telah relatif baik. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 71,98 yang mencerminkan tingkat pembangunan manusia termasuk dalam kelompok Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Rata-rata kesenjangan ekonomi yang diukur dengan Rasio Gini (GINI) adalah 0,34. Rata-rata tingkat kemiskinan yang diukur dengan persentase penduduk yang dikelompokkan sebagai penduduk miskin terhadap seluruh penduduk (POVRT) adalah 10,37 yang menunjukkan bahwa secara rata-rata, persentase jumlah penduduk miskin dari jumlah seluruh penduduk pada sampel provinsi sebesar 10,37% dan sebesar 89,63% dari jumlah penduduk telah berada di atas garis kemiskinan.

2. Pengujian Statistik

Pengujian model regresi data panel melalui Uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan bahwa model regresi terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect*. Sementara itu, hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model penelitian telah bebas dari masalah normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Hasil pengujian model regresi dengan *fixed effect* dalam penelitian ini dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Regresi *Fixed-Effects*

$$\text{KUB}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{IPM}_{it} + \beta_2 \text{GINI}_{it} + \beta_3 \text{POVERTY}_{it} + \varepsilon_{it}$$

	Coefficient	Std. Error	Z	p-value	
Const.	-122,259	59,1708	-2,066	0,0388	*
IPM	2,85242	0,686512	4,155	<0,0001	*
GINI	-29,8860	49,7800	-0,6004	0,5483	*
POVRT	0,155395	0,839324	0,1851	0,8531	*
Mean dependent var	74,38657		S.D. dependent var	5,124241	
Sum squared resid	633,3165		S.E. of regression	3,121431	
LSDV R-squared	0,761197		Within R-squared	0,259856	
F(3, 33)	8,73876		p-value	0,000208	5

*** Signifikan pada level $\alpha = 1\%$

** Signifikan pada level $\alpha = 5\%$

Jumlah Sampel = 102. KUB = Kerukunan Umat Beragama yang diukur dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama, IPM = Kualitas pembangunan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia, GINI = Tingkat kesenjangan ekonomi yang diukur dengan rasio Gini, POVRT = Tingkat kemiskinan yang diukur dengan persentase penduduk yang dikelompokkan sebagai penduduk miskin terhadap seluruh penduduk.

Sumber: diolah dari data primer, 2024

Hasil pengujian regresi melalui model *fixed effect* pada Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel independen (IPM, GINI, dan POVRT) secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kerukunan umat beragama (KUB). Selain itu, model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen (KUB) sebesar 76,12%, sedangkan 23,88% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model regresi. Hasil pengujian regresi juga menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif secara signifikan terhadap indeks kerukunan umat beragama (KUB), sedangkan kesenjangan ekonomi yang diukur dengan rasio Gini (GINI) dan tingkat kemiskinan penduduk yang diukur dengan persentase jumlah penduduk miskin (POVRT) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks kerukunan umat beragama (KUB).

3. Hasil Pengujian

a. Pengaruh Pembangunan Masyarakat Terhadap Kerukunan Umat Beragama

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan masyarakat, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kerukunan umat beragama yang diukur dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB). Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang tinggi, yang mencakup aspek kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, cenderung memiliki tingkat kerukunan umat beragama yang lebih baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu Sofiandi *et al.* (2022), Dash (2011), Agustia *et al.* (2023), dan Hutabarat (2023) yang menyatakan bahwa faktor ekonomi dan faktor pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kerukunan antar umat beragama.

Tingkat pendidikan yang baik cenderung dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang mendalam terhadap keberagaman agama pada masyarakat dan pentingnya keharmonisan sosial di tengah keberagaman tersebut sehingga dapat meningkatkan pengertian, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman agama sekaligus meningkatkan tingkat kerukunan antar umat beragama. (Dash, 2011; Agustia *et al.*, 2023; Hutabarat, 2023). Pendidikan juga meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya sehingga memperkecil potensi konflik dalam kerukunan sosial yang didorong oleh kesenjangan ekonomi (Asokan, 2011).

b. Pengaruh Kesenjangan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kerukunan Umat Beragama

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi masyarakat, yang diukur dengan Rasio Gini (GINI), dan tingkat kemiskinan masyarakat, yang diukur dengan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah seluruh penduduk (POVRT), tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kerukunan umat beragama, yang diukur dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB). Hal ini mengindikasikan bahwa Kesenjangan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan tidak menjadi *critical factor* dalam upaya pengembangan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia.

Kearifan lokal yang kuat dari budaya masyarakat suatu daerah, serta adanya sikap empati dan saling menghargai antar pemeluk agama yang dibarengi dengan komunikasi yang baik dapat mendukung terciptanya kerukunan antar umat beragama (Yudiana *et al.*, 2017). Selain sikap dan perilaku masyarakat, kebijakan pemerintah setempat juga berperan penting dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama (Handayani dan Giantara, 2021). Dengan demikian, kearifan lokal yang kuat dan kebijakan pemerintah setempat tersebut dapat menjadi faktor yang mempengaruhi sekaligus menjadi batasan tentang bagaimana masyarakat berinteraksi sosial dengan sesama dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, terlepas dari kondisi perekonomian pada daerah tersebut.

SIMPULAN

Hasil penelitian empiris menggunakan pendekatan regresi data panel dengan *fixed effect method* terhadap sampel 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2021 hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa Kualitas Pembangunan Manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Sementara itu, Kesenjangan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Dengan demikian, pengembangan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia sebaiknya perlu diiringi dengan upaya yang optimal dari berbagai pihak untuk meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia, yang mencakup aspek pendidikan, ekonomi, dan kesehatan sehingga turut dapat menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dalam kemajemukan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asokan, Amarnath. (2011). *Education is pursuit of truth*. Universal Education for Social Harmony, 18-24. National Foundation for Communal Harmony New Delhi June 2011.
- Agustia, N.R., Harahap, A.S., Nofianti, Rita. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kerukunan Umat Antar Beragama Di Kel Kwala Begumit, Kec Stabat Kab Langkat*. Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5858-5868 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia – Hasil Sensus Penduduk 2010*. ISBN: 978-979-064-417-5

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2023 Volume 18 Tahun 2024*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/05/13/8f77e73a66a6f484c655985a/indeks-pembangunan-manusia-2023.html>
- Dash, Amrita. (2011). *Education Fosters Social Solidarity*. Universal Education for Social Harmony, 10-12. National Foundation for Communal Harmony New Delhi June 2011.
- Handayani, Satri, Giantara, Febri. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kerukunan Umat Beragama Pada Saat Pandemi Virus Corona*. Madania: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Volume 11, Nomor 1, Juni 2021, P-ISSN : 2088-3226; E-ISSN : 2620-8210
- Hutabarat, Franklin. (2023). *Navigating Diversity: Exploring Religious Pluralism and Social Harmony in Indonesian Society*. European Journal of Theology and Philosophy Vol 3 Issue 6 November 2023 ISSN 2736-5514
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Indeks Kerukunan Umat Beragama 2023*.
- Setara Institute. (2024). *Rilis Data Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) 2023: Dari Stagnasi Menuju Stagnasi Baru*. https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2024/06/Rilis-Data-Kondisi-KBB-2023_Setara-Institute_Ind.pdf
- Sofiandi, Husni, D., Masbukin, Nuh, Z. M. (2022). *Antara Ekonomi dan Toleransi Membingkai Ekonomi Dalam Keragaman*. Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama Vol. 14, No. 2, Juli – Desember 2022
- United Nations Development Programme. (2024). *Human Development Report 2023/2024 Technical Notes*. https://hdr.undp.org/sites/default/files/2023-24_HDR/hdr2023-24_technical_notes.pdf
- Yudiana, I.K., Miskawi, Pardi, I.W. (2017). *Analisis Kerukunan Antar Umat Beragama pada Masyarakat Multikultur di Ujung Timur Pulau Jawa (Studi Kasus di Desa Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 6, No. 2, Oktober 2017 P-ISSN: 2303-2898